

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Isu atau permasalahan yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan agama dan politik menjadi isu yang telah hangat pada lima tahun terakhir. Dengan melihat kasus-kasus yang terjadi dan bersinggungan dengan Islam seperti penistaan agama, aksi kekerasan, liberalisme, komunisme dan lain-lain yang membuat umat Islam menjadi kelompok yang didiskriminasi oleh kelompok lain termasuk sesama orang Islam. Isu agama ini juga bertepatan dengan menjelangnya Pemilu 2019 yang membuat isu-isu agama diseret ke politik sehingga tidak bisa dilepaskan isu agama dengan politik. Oleh karena itu, isu agama tersebut membuat sekelompok ormas Islam bergerak untuk membela agama Islam, bahkan membangkitkan syariat Islam yang telah lama tidak muncul ke permukaan.

Gerakan ini telah dilakukan oleh KPSI Sumatera Barat dalam menegakkan syariat Islam di Sumatera Barat pada lima tahun terakhir. Gerakan tersebut sebagai respon terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat yang bukan hanya berkaitan dengan Islam, namun juga kemanusiaan juga digerakkan oleh KPSI Sumatera Barat. Gerakan KPSI Sumatera Barat hampir sama dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh ormas Islam di daerah lain yang menunjukkan betapa pentingnya gerakan Islam sebagai tanda bahwa Islam tidak boleh dilecehkan dalam berbagai bentuk apapun, meskipun pada tujuannya memiliki unsur politik terkait dengan Pemilihan Umum 2019.

Pada penelitian ini menggunakan teori gerakan sosial Islam yang dikemukakan oleh Noorhaidi Hasan dimana dia Teori tersebut menjelaskan bagaimana gerakan sosial yang dilakukan oleh KPSI Sumatera Barat dalam menegakkan syariat Islam di Sumatera Barat pada 2014-2019. Noorhaidi Hasan mengemukakan bahwa ada empat unsur bagian dari teori gerakan sosial Islam yaitu struktur mobilisasi sumber daya, peluang politik, *framing* (pembingkai) dan aliansi atau jaringan.

Pertama, struktur mobilisasi sumber daya dimana adanya unsur kekecewaan akibat peminggiran dan modernisasi yang dirasakan oleh khalayak luas. Pada pandangan ini, mobilisasi sumber daya bersumber dari bagaimana gerakan sosial mengorganisasikan ketidakpuasan, mengurangi biaya aksi, menciptakan jaringan yang solidaritas, membagi insentif dan mencapai kesepakatan internal. Pada bagian ini, KPSI Sumatera Barat tidak berdasarkan atas ketidakpuasan namun kekhawatiran KPSI terhadap dekadensi masyarakat terhadap agama Islam sehingga menjadi landasan bagi KPSI Sumatera Barat untuk memobilisasi sumber daya dalam gerakannya dan murni sebagai organisasi Islam meskipun pada tujuan gerakannya diikuti dengan gerakan politik anggota KPSI. Selain itu, gerakan yang dilakukan oleh KPSI Sumatera Barat bukan mengatasnamakan KPSI melainkan mengatasnamakan umat Islam.

Kedua, peluang politik dimana merupakan penguat dari mobilisasi sumber daya yang bersifat massif dan mengandung unsur kekerasan yang mengatasnamakan agama. Gerakan sosial yang dilakukan oleh KPSI Sumatera Barat memanfaatkannya dengan melakukan dakwah seperti mengadakan tabligh akbar, parade tauhid, memberantas maksiat yang bisa menggunakan cara kekerasan dan lain sebagainya. Peluang politik

tersebut dimanfaatkan secara efektif oleh KPSI Sumatera Barat seiring dengan isu-isu agama yang membuat resah oleh umat Islam di Indonesia.

Ketiga, Pembingkai (framing) dimana gerakan sosial yang dilaksanakan oleh kelompok membingkai suatu wacana untuk menjadikan target mobilisasi pada gerakan sosial. KPSI Sumatera Barat melakukan pembingkai atau framing dengan berlandaskan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, meskipun gerakan yang dilakukan oleh KPSI Sumatera Barat mengandung unsur politik secara tersirat. Pada pembingkai ini baik gagasan maupun gerakannya tidak disalurkan secara luas oleh beberapa media dikarenakan keterbatasan dana dan kemampuan yang dimiliki oleh KPSI Sumatera Barat.

Keempat, Aliansi atau jaringan dimana kelompok memiliki aliansi atau jaringan untuk memperkuat gerakan mereka. KPSI Sumatera Barat memiliki jaringan atau aliansi untuk memperkuat gerakan mereka dengan melibatkan anggota-anggota mereka untuk membentuk ormas Islam lain seperti FMM, GNPF Sumatera Barat, Paga Nagari bahkan menjadi ketua pada ormas Islam tersebut. Sedangkan pada perekrutan anggota menerima semua kalangan untuk masuk ke anggota KPSI Sumatera Barat asalkan mau menegakkan syariat Islam. Namun, ada konflik kepentingan anggota KPSI Sumatera Barat dalam mendirikan organisasi yang setara dengan KPSI Sumatera Barat dan secara tidak langsung mengakibatkan nama KPSI Sumatera Barat tenggelam akibat konflik tersebut.

6.2 Saran

Pada bagian saran, terdapat dua hal yang menjadi bagian penting pada penulisan skripsi ini. *Pertama*, saran secara akademis dimana secara teori yang telah dipakai telah menjelaskan secara umum terhadap gerakan sosial KPSI Sumatera barat mengenai

indikator-indikator unsur gerakan sosial Islam tersebut sehingga bisa mendeskripsikan secara luas mengenai gerakan sosial Islam KPSI Sumatera Barat. Namun, teori gerakan sosial Islam tersebut memiliki eksplorasi yang mendalam dan digunakan untuk gerakan Islam terbesar yang mencakup level nasional sehingga pada level lokal seperti KPSI Sumatera Barat dianggap kurang menjelaskan keadaan yang sebenarnya berdasarkan teori tersebut. Diperlukan sebuah teori gerakan sosial yang inovatif yang bisa menjelaskan suatu organisasi atau gerakan pada level lokal. Pada penelitian ini bisa juga sebagai dasar bagi penelitian lain dari segi perspektif yang berbeda sehingga memperkaya pengetahuan akan penelitian ini.

Kedua, saran secara praktis bisa menjadi rujukan bagi para pengambil/pemangku kebijakan terhadap gerakan sosial Islam yang dilakukan oleh ormas Islam di Sumatera Barat seperti KPSI. Banyak kegiatan atau aksi KPSI Sumatera Barat atau ormas Islam lainnya yang bisa menjadi landasan bagi pemerintah atau pengambil kebijakan untuk menegakkan syariat Islam di Sumatera Barat seperti pemberantasan maksiat, dan menanggapi isu-isu agama bersama ormas Islam di Sumatera Barat sehingga membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan.